



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan akuntabilitas atas organisasi sektor publik di Indonesia semakin mengemuka dalam berbagai bentuk seperti semakin ramai media mengungkapkan opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) baik atas kementerian lembaga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI, BPK-RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2017 (Metro Tv, 2018).

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, BPK-RI menemukan temuan-temuan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun LKPP tahun 2017 mendapatkan opini audit WTP, tetap perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah mengenai rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun mendatang akan baik (BPK, 2018).

Pembicaraan mengenai opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tersebut jelas menunjukkan perhatian masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi organisasi sektor publik. Lembaga pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan tetapi juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam suatu laporan yang sistematis. Akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dengan menyampaikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo (2006) dalam Nurillah (2014)). Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya informasi laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, masyarakat semakin cerdas menuntut adanya transparansi dan tuntutan publik harus direspon secara positif.

Laporan keuangan daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan memberikan penilaian berupa opini audit yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*). Ketika

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan daerah artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Nurillah, 2014). Untuk mendapatkan opini WTP maka pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Purwasetya et al (2013) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Berdasarkan data yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2017, laporan keuangan daerah atas Provinsi Banten mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang dimana laporan keuangan daerah Provinsi Banten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah mengikuti standar yang telah ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut ini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan IHPS 2017 untuk provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Opini Audit Tahun 2012 - 2016 Provinsi Banten

No.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Audit				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Provinsi Banten	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP
2	Kabupaten Lebak	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kabupaten Pandeglang	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
4	Kabupaten Serang	WTP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
5	Kabupaten Tangerang	WTP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
6	Kota Cilegon	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
7	Kota Serang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP
9	Kota Tangerang Selatan	WTP DPP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2017

Berdasar data dari tabel 1.1, Pemerintah Kota Tangerang selama lima tahun terakhir selama berturut-turut mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK RI Perwakilan Provinsi mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah di Indonesia. Sehingga penghargaan yang diraih tanpa putus tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kota Tangerang (Tangerang Kota, 2015).

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan bertambahnya komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 1 dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman, dan pemerintah. Pentingnya informasi dalam laporan keuangan untuk kepentingan beberapa kelompok pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan yang disusun harus berkualitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah merupakan ukuran-ukuran normatif yang diukur dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang pertama adalah relevan merupakan informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran di masa lalu, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, laporan keuangan disajikan tepat waktu dan lengkap. Kedua, andal merupakan informasi dalam laporan keuangan yang menggambarkan secara jujur semua transaksi yang seharusnya disajikan, dapat diuji lebih dari sekali dengan hasil yang tidak jauh berbeda, dan informasi pada laporan keuangan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Ketiga, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan entitas lainnya. Keempat, dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam penyusunan laporan keuangan merupakan sumber daya dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kriteria tertentu seperti pendidikan minimal D3 akuntansi, mengetahui dan menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan daerah, menyusun laporan keuangan sesuai dengan fungsi akuntansi, proses

akuntansi dan prosedur akuntansi. Karyawan keuangan dalam kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus didukung adanya sumber daya pendukung operasional seperti teknologi informasi dan sistem informasi dalam menyusun laporan keuangan. Kualitas SDM juga perlu ditingkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam bidang akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pendidikan minimal D3 akuntansi akan lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan, karena karyawan tersebut sudah mengetahui bagaimana proses akuntansi hingga menjadi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu. Fungsi akuntansi dan proses akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prosedur yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar informasi laporan keuangan daerah tersebut dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. SDM yang bekerja sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan tidak berpihak kepada pihak tertentu, sehingga keandalan laporan keuangan dapat terjamin. Dengan adanya sumber daya pendukung operasional, maka dapat mengurangi kesalahan pencatatan pada laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan tersebut, dan penyusunan laporan keuangan menjadi cepat sehingga laporan keuangan menjadi relevan (disajikan tepat waktu). Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka informasi laporan keuangan daerah yang disusun oleh SDM semakin berkualitas.

Roshanti (2014) dan Handayani (2015) telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Nurillah dan Mahaputra (2014), Evicahyani (2016), Sari (2016), Kiranayanti (2016), dan Wibawa (2017) juga membuktikan bahwa kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Seluruh aktivitas pemerintahan dalam mengelola dan menjaga sumber daya yang dimiliki, maka para pemimpin daerah membangun sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu kebijakan untuk memberikan keyakinan bahwa telah tercapainya suatu tujuan organisasi dengan menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian internal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian yaitu adanya kode etik yang tertulis dan pimpinan memberikan contoh berperilaku sesuai dengan kode etik. Kedua adalah penilaian risiko yaitu adanya penentuan batas, toleransi, pengendalian internal dan manajemen terhadap risiko. Ketiga adalah kegiatan pengendalian, yaitu adanya otorisasi dan pemisahan tugas. Keempat adalah informasi dan komunikasi, yaitu adanya sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab dan sistem akuntansi yang memungkinkan audit. Kelima adalah pemantauan pengendalian internal, yaitu melakukan pengawasan atas aktivitas pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan atas catatan akuntansi.

Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan komponen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, maka dapat

terciptanya perilaku karyawan yang positif dan sesuai dengan kode etik dengan adanya kesadaran bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku, jujur, dan tidak berpihak kepada pihak tertentu sehingga keandalan laporan keuangan tersebut dapat terjamin. Dengan adanya batasan-batasan, otorisasi, dan pemisahan tugas yang sudah ditentukan, maka laporan keuangan daerah hanya dapat disusun oleh pihak keuangan. Pemantauan atas catatan akuntansi yang dilakukan oleh pimpinan akan menjadikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan yang berlaku, sehingga terbebas dari salah saji material dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin baik pemerintah menerapkan sistem pengendalian internal maka informasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan semakin berkualitas.

Roshanti (2014), Mahaputra (2014), Handayani (2015), Sari (2016), Kiranayanti (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Evicahyani (2016) juga membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun laporan keuangan daerah adalah menerapkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang merupakan konsep dasar SAP dan sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah, menerapkan basis akuntansi yang ditetapkan oleh SAP yaitu basis akrual (pendapatan, belanja, pembiayaan) dan basis kas (aset, kewajiban, ekuitas dana), mengungkapkan informasi yang perlu disajikan dalam laporan keuangan daerah dan catatan atas laporan keuangan sesuai SAP. Penerapan SAP atas pengklasifikasian, pengakuan, perhitungan, dan pencatatan atas aset, persediaan, dan kewajiban, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya dan periode berjalan.

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang mengungkapkan hal-hal yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penyusun laporan keuangan dapat menyajikan informasi laporan keuangan daerah yang relevan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah harus konsisten dari tahun ke tahun, sehingga informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman para pengguna laporan keuangan dan mengungkapkan hal yang belum dijelaskan di lembar muka laporan keuangan, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan keandalan laporan keuangan tetap terjamin karena tidak menyajikan informasi yang menyesatkan. Pengklasifikasian, pengakuan, perhitungan, dan pencatatan atas aset, persediaan, dan kewajiban harus

diungkapkan secara lengkap sehingga informasi laporan keuangan tersebut relevan. Koreksi kesalahan periode sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian pada laporan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan saldo ekuitas untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa semakin baik kantor pemerintahan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka informasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan semakin berkualitas.

Mahaputra (2014), Evicahyani (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah memanfaatkan sistem dengan tujuan penyusunan laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi dengan cepat, mudah dan akurat yang didukung dengan adanya jaringan internet dan jaringan komputer dalam jumlah yang cukup sebagai penghubung dalam pengiriman informasi, sehingga proses akuntansi hingga pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem informasi akuntansi keuangan daerah perlu diberikan pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat waktu. Proses akuntansi yang dilakukan secara komputerisasi akan mengurangi kesalahan pencatatan atau salah saji material, sehingga dapat menjaga keandalan laporan keuangan karena

konsistensi informasi terjaga. Selain itu, sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang tersambung dengan internet yang memadai akan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, dengan begitu laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu (relevan). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Pujiswara (2014), Maeka Sari (2014), dan Evicahyani (2016) telah membuktikan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah. Dewi (2014) telah membuktikan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Pemahaman akuntansi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena seseorang yang bertugas membuat laporan keuangan harus memahami akuntansi agar dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman akuntansi adalah pengetahuan di bidang akuntansi yang dimiliki oleh karyawan keuangan mengenai prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah, seperti prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, aset tetap, akuntansi selain kas yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan pencatatan *double entry*. Pemahaman akuntansi tersebut harus sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan oleh kantor pemerintahan, yaitu basis kas dan basis akrual.

Karyawan yang memahami akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat menyusun laporan keuangan dengan cepat, mudah, dan menggunakan bahasa akuntansi yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Pemahaman staf keuangan mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan diungkapkan dalam laporan arus kas, sedangkan untuk transaksi selain kas akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset tetap, dan akuntansi selain kas harus disajikan dengan jujur dan lengkap, sehingga relevansi dan keandalan laporan keuangan dapat terjamin. Basis akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun adalah untuk mempermudah melakukan perbandingan dengan periode sebelumnya. Perubahan basis akuntansi dapat dilakukan dengan syarat bahwa basis akuntansi yang diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan basis akuntansi sebelumnya, agar pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah memahami informasi laporan keuangan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan karyawan yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik dapat menghasilkan nilai informasi laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Sari (2016), Aniftahudin (2016), dan Wibawa (2017) telah membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

Penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roshanti (2014). Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel independen penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemahaman akuntansi yang mengacu pada penelitian Wibawa (2017), serta menambahkan variabel independen pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) yang mengacu pada penelitian Evicahyani (2016). Variabel-variabel tersebut ditambahkan karena variabel tersebut juga merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Tangerang, sedangkan dipenelitian sebelumnya menggunakan sampel SKPD Kabupaten Buleleng;
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada SKPD Kota Tangerang)”**

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan lingkup masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah;
2. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD), dan pemahaman akuntansi;

3. Objek pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang. Responden yang dipilih yaitu pegawai yang menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan, dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan di SKPD Kota Tangerang;
4. Tahun penelitian pada tahun 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas Sumber daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah?
3. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah?
5. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah;
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah;
3. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah;
4. Pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah;
5. Pengaruh pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, untuk mengetahui letak kesalahan dalam mengolah informasi keuangan menjadi laporan keuangan daerah dan segera melakukan perbaikan untuk kedepannya menjadi lebih baik;
2. Bagi masyarakat, untuk memahami tentang akuntansi keuangan daerah dan sarana informasi mengenai laporan keuangan daerah;
3. Bagi dosen, sebagai sarana dalam menuangkan ide, gagasan dan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada secara teori dan dapat dibuktikan kebenaran dari teori tersebut;

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya dan dilakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam;
5. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana memperluas pengetahuan mengenai laporan keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bagian ini membahas tentang landasan teori yang digunakan yaitu laporan keuangan daerah, jenis laporan keuangan daerah, kualitas nilai informasi laporan keuangan daerah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) dan pemahaman akuntansi. Bagian ini juga membahas penelitian terdahulu dan hipotesis berdasarkan landasan teori yang digunakan, model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil dari penelitian serta menjelaskan bagaimana analisa terhadap data yang ada dan juga mengenai pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan



UMN